

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A. Mansyur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- A. Widiawan Gunakay, S.A, *Sejarah dan konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: Amirco, 1998
- Baharuddin Soerjobroto. *Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. 1992
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 1986
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2007
- E. Sumaryono. *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius. Yogyakarta, 2002
- Fachri Bey, *Modul Perkuliahan Hukum Sanksi*, FH UIEU, 2004
- Ismael Saleh. *Asimilalasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*. Departemen Kehakiman. Jakarta. 1987
- Irwan Petrus, dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: IND HILL CO, 2008

- J. M. Van Beemelen. *Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta. 1984.
- L. Herbet, Packer, dikutip oleh Barda Nawawi Arif, *Dalam Kebijakan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: BP Undip. 1995
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999
- Muladi dan Barda Nawawi arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002
- Peter Baehr, et. al, *Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1997
- Petrus irwan panjaitan dan pandapotan simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. (Jakarta:Pustaka sinar harapan
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2006
- Purniati Mangunsong, "Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat" Laporan Penelitian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1988
- R. Achmad S. Soemadipraja, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Roeslan Saleh. *Beberapa Azas-Azas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Akasara Baru. 1981
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selektia Krimonologi*. Refika Aditama. Bandung. 2007
- Sanusi Has. *Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*. Medan: Monora. 1976
- SF Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2004

Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammad Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003

United Nations, *Fifth Nations Congress*, Report, Nomor: 265,268,273, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: BP Undip, 1994

Yeni Widowati *et al.* *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Lab Hukum FH UMY. 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 1 Ayat 3

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 15 s/d Pasal 17

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Th. 1985 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Th.1992 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*

Indonesia. Undang-undang No.12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*. LNRI. no:77 TLN.no:3416

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Indonesia, *Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. LNRI no: 165 TLNRI no: 3886

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Th. 1999 *Tentang Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04.10 Th. 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.*